

Perlindungan Dasar ART dan Pertanyaan Umum

Latar Belakang

Integritas sosial dan lingkungan adalah inti dari misi ART. Prinsip utama kedua yang mengatur operasi ART secara spesifik mensyaratkan ART untuk

“Sejalan dengan keputusan Konferensi Peserta (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Perjanjian Paris, Kerangka Kerja Warsawa untuk REDD+, dan Pelindung Cancun, yang menetapkan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola yang diharapkan untuk ditegakkan saat melakukan kegiatan REDD+, khususnya untuk memastikan pengakuan, rasa hormat, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat asli dan masyarakat setempat”

Persyaratan perlindungan dalam TREES membongkar Perlindungan Cancun ke dalam tema dan indikator untuk mempromosikan implementasi dan pelaporan yang konsisten dan transparan di seluruh Peserta. Meskipun demikian, kerangka kerja ini dirancang untuk memungkinkan Peserta ART membangun sistem perlindungan nasional yang sudah ada dan merancang serta menerapkan program yang mencerminkan kondisi unik mereka.

Cara kerjanya

Persyaratan perlindungan TREES didasarkan pada Pelindung Cancun. ART membongkar Perlindungan Cancun ke dalam 16 area tematik utama guna menyederhanakan operasi dan pelaporan dengan persyaratan PBB yang ada serta memastikan konsistensi implementasi dan pelaporan di seluruh Peserta ART.

Setiap tema memiliki struktur, proses, dan indikator hasil untuk mencerminkan langkah yang digunakan negara dalam menetapkan sistem perlindungan nasional mereka guna menangani dan menghormati semua aspek Pelindung Cancun.

Yurisdiksi yang berpartisipasi harus memenuhi semua indikator struktur dan proses selama periode kredit pertama. Selanjutnya, mereka harus mematuhi atau memberikan rencana untuk mematuhi indikator hasil. Semua indikator harus dipenuhi dalam waktu lima tahun setelah yurisdiksi bergabung dengan ART. Setelah sepenuhnya diimplementasikan, yurisdiksi yang berpartisipasi dapat menggunakan laporan Ringkasan Informasi UNFCCC mereka serta Sistem Informasi Perlindungan mereka untuk memantau dan melaporkan perlindungan di bawah TREES, meskipun bentuk pelaporan lain diizinkan. Ruang lingkup audit validasi dan verifikasi pihak ketiga yang independen mencakup semua persyaratan upaya perlindungan. Kredit TREES tidak akan diterbitkan jika yurisdiksi tidak dapat menunjukkan kesesuaian dengan perlindungan TREES.

Pertanyaan Umum

1. Apakah TREES melindungi hak-hak Masyarakat Adat?

Ya. Memastikan pengakuan, rasa hormat, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat Pribumi dan masyarakat setempat merupakan salah satu prinsip ART yang tidak dapat diubah. TREES mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi:

- Mengidentifikasi masyarakat adat dan komunitas lokal, atau yang setara
- Menghormati dan melindungi pengetahuan tradisional
- Hormati, lindungi, dan penuhi hak masyarakat Pribumi dan/atau masyarakat setempat, atau yang setara.

Masing-masing tema ini mencakup indikator struktural, proses, dan hasil yang perlu divalidasi dan diverifikasi.

2. Apakah TREES mewajibkan pelibatan pemangku kepentingan seperti Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di seluruh proses atau hanya di perencanaan awal?

Ya. TREES mewajibkan semua pemangku kepentingan - termasuk pemilik lahan swasta, pengembang proyek, IPLC, dan lain-lain untuk berpartisipasi dalam desain, implementasi, dan pemantauan kegiatan REDD+. Hal ini memastikan para pemangku kepentingan ini berpartisipasi di setiap langkah termasuk implementasi, pengumpulan data, dan penilaian keberhasilan program, memberikan peluang tambahan untuk masukan dan umpan balik. Secara khusus, TREES mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi:

- Menghormati, melindungi, dan memenuhi hak semua pemangku kepentingan terkait untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam rancangan dan penerapan tindakan REDD+
- Menggalakkan prosedur partisipatif yang memadai untuk partisipasi yang berarti dari masyarakat adat dan komunitas setempat, atau yang setara.

3. Apakah TREES memerlukan rencana berbagi manfaat?

Meskipun TREES tidak mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk mengembangkan rencana pembagian manfaat tingkat nasional, TREES memastikan penggunaan yang adil dan merata dari hasil pendapatan REDD+. TREES melakukan hal ini dengan cara berikut:

- Dengan mendorong transparansi dan mencegah serta memberantas korupsi
- Dengan mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kepemilikan lahan
- Dengan mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia masyarakat Pribumi dan masyarakat setempat, atau yang setara. Hak-hak ini termasuk pembagian manfaat.
- Dengan mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak semua pemangku kepentingan terkait untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam desain dan implementasi aksi REDD+

- Dengan mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk menggalakkan prosedur partisipatif yang memadai untuk partisipasi yang berarti dari masyarakat adat dan komunitas setempat, atau yang setara.
- Dengan insentif peningkatan manfaat sosial dan lingkungan

Kriteria dan indikator terkait ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merupakan bagian dari proses pengembangan kegiatan REDD+, dan bahwa perjanjian telah ditaati dan diterapkan sebagaimana disepakati. Rencana berbagi manfaat dapat dikembangkan sebagai bagian dari proses ini, namun dapat berada di tingkat program dan bukan di tingkat nasional. Panduan verifikasi juga menyatakan bahwa program berbagi manfaat, jika dikembangkan, dapat menjadi bukti yang harus ditinjau oleh pemberi verifikasi.

Selain itu, rencana berbagi manfaat tradisional cenderung berfokus pada kompensasi moneter. Dalam banyak kasus, pemangku kepentingan dapat memilih untuk menerima manfaat nonmoneter seperti hak kepemilikan lahan, peluang pendidikan dan pelatihan, akses ke pasar, tata kelola yang ditingkatkan, hak karbon atau manfaat lainnya. Manfaat yang lebih luas ini akan diidentifikasi sebagai bagian dari proses pengembangan aktivitas REDD+ partisipatif.

4. Apakah memungkinkan menempelkan proyek atau aktivitas masyarakat dalam ART?

Ya, ART memungkinkan dilakukannya aktivitas di tingkat proyek dan pengaturan pembagian manfaat lainnya.

ART hanya memberikan kredit pada tingkat yurisdiksi, kepada pemerintah subnasional nasional atau besar. Hal ini penting tidak hanya untuk mencapai hasil dalam skala, tetapi juga karena bertindak di tingkat yurisdiksi memberikan insentif kepada pemerintah untuk meningkatkan tata kelola hutan: mengatur penggunaan lahan, menegakkan hukum, mempromosikan program insentif hutan, dan mengakui hak tanah Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal (IPLC).

Namun demikian, pendekatan yurisdiksi tidak melarang pemerintah bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai ambisi yang lebih besar. Untuk program REDD+ pada skala yurisdiksi, diantisipasi dan diharapkan bahwa pemerintah akan memberikan pengawasan dan koordinasi, tetapi desain dan implementasi tersebut akan dilakukan bersama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah daerah dan lokal, Masyarakat Adat, masyarakat lokal dan sektor swasta.

Meskipun ART tidak secara langsung mengkreditkan aktivitas tingkat proyek, tetapi dapat diimplementasikan di bawah program REDD+ yurisdiksional melalui berbagai skenario. ART sepenuhnya memahami peran penting proyek dalam menerapkan Strategi REDD+ yurisdiksi. Sebagai contoh, kegiatan tingkat proyek dapat menargetkan hot spot deforestasi dan mengalokasikan modal dan sumber daya manusia secara efisien yang diperlukan untuk mengatasi ancaman langsung di area berisiko tinggi.

ART tidak mengatur cara pemerintah bekerja dengan masyarakat adat, masyarakat setempat, atau sektor swasta. Sebaliknya ART menawarkan fleksibilitas untuk setiap jumlah pendekatan

yang akan digunakan sesuai dengan situasi masing-masing negara untuk menghindari proyek atau merancang perjanjian alokasi manfaat.

Ada beberapa pilihan tentang bagaimana proyek dapat dikabarkan di bawah program yurisdiksi yang dijelaskan dalam makalah Nesting Under ART yang tersedia di bagian Sumber Daya di situs web ART.

5. Apakah ART mengharuskan yurisdiksi yang berpartisipasi mendukung atau meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional tertentu?

ART menghormati hak pemerintah yang berdaulat untuk memilih apakah mendukung atau tidak mendukung atau meratifikasi perjanjian internasional. Namun demikian, melalui pengamanannya, TREES mengharuskan agar kegiatan REDD+ sejalan dengan tujuan konvensi dan perjanjian internasional terkait yang diratifikasi atau disetujui secara resmi untuk diterapkan oleh Peserta atau pemerintah nasional. Dalam beberapa kasus, sebuah negara mungkin tidak meratifikasi suatu perjanjian tetapi mungkin telah mengadopsi ketentuan tertentu dalam kerangka hukumnya, yang akan disertakan sebagai referensi.

Untuk 23 negara yang telah meratifikasi Konvensi Masyarakat Pribumi dan Suku Asli (Organisasi Buruh Internasional - ILO 169), persyaratan perjanjian ini akan disertakan melalui referensi. Untuk 148 negara yang mendukung Deklarasi Hak Masyarakat Adat PBB (UNDRIP), setiap persyaratan UNDRIP yang telah dikodifikasi dalam kerangka hukum mereka akan disertakan melalui rujukan dan persyaratan lainnya akan menjadi praktik terbaik yang diharapkan.

6. Apakah TREES memerlukan mekanisme pengaduan?

TREES memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses ke keadilan, memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa di semua tingkat yang relevan dan dengan cara yang tidak bersifat diskriminasi dan tidak memiliki biaya yang dilarang. Dengan kata lain, mekanisme pengaduan diperlukan, tetapi TREES tidak menetapkan proses pengaduan khusus yang harus diikuti. Pada skala nasional atau sub.nasional, mungkin tepat untuk memiliki beberapa sistem pengaduan yang menangani berbagai masalah atau pada tingkat yang berbeda. Selain itu, penting untuk mengenali dan memungkinkan fleksibilitas mengingat perbedaan kerangka hukum dari satu negara ke negara lainnya.

7. Mengapa TREES tidak menentukan parameter pemantauan perlindungan mana yang harus digunakan?

TREES mencakup indikator hasil untuk setiap tema guna memastikan bahwa parameter didefinisikan, dipantau, dilaporkan, dan diverifikasi. Dengan cara ini, parameter yang paling tepat akan digunakan untuk memastikan program dan aktivitas mematuhi perlindungan TREES.

Setiap yurisdiksi yang berpartisipasi akan menerapkan serangkaian kegiatan REDD+ yang unik di lokasi unik dengan serangkaian pemangku kepentingan yang unik. Menentukan seperangkat parameter pemantauan umum untuk mendefinisikan implementasi "berhasil" dari semua safeguard tidak mungkin dilakukan. Untuk melakukannya akan merusak proses perencanaan partisipatif di mana parameter pemantauan spesifik terhadap keadaan dan aktivitas yang

direncanakan akan ditentukan. Penetapan parameter secara arbitrer dalam TREES juga dapat memaksa beberapa yurisdiksi yang berpartisipasi untuk menerapkan aktivitas yang tidak diinginkan oleh pemangku kepentingan untuk dimasukkan ke dalam parameter tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan ART.

8. Apakah TREES mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk menunjukkan aktivitas REDD+ “jangan lakukan bahaya”?

TREES mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk melakukan “tidak ada kerugian bersih” dan mengidentifikasi prioritas peningkatan manfaat sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh tindakan REDD+. Misalnya, tautan dapat dibuat antara aktivitas REDD+ dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) suatu negara.

9. Bagaimana TREES menangani pengamanan lahan dan mencegah perampasan tanah?

TREES mewajibkan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk terlebih dahulu menjelaskan prosedur pengakuan, inventarisasi, pemetaan, serta pengamanan hak penyimpanan tanah dan sumber daya yang lazim dan sesuai di tempat tindakan REDD+ diterapkan. Prosedur ini mungkin berhubungan langsung dengan REDD+ atau mungkin menjadi bagian dari kerangka atau kebijakan lain yang berlaku. Kemudian, sumber daya harus dialokasikan untuk menerapkan prosedur dan akhirnya peserta harus menunjukkan bahwa pemangku kepentingan memiliki akses, penggunaan, dan kontrol atas lahan dan sumber daya sesuai dengan hak mereka.

Sebagaimana diuraikan dalam TREES, tidak ada kredit yang akan dikeluarkan kecuali Peserta dapat menunjukkan kepemilikan atas kredit atau hak untuk mengambil manfaat dari pembayaran untuk pengurangan atau penghapusan emisi (ERR). Sebagai contoh, dalam hal di mana hak atas ERR diberikan kepada pemilik lahan swasta dalam bidang akuntansi, pemerintah perlu mengadakan perjanjian dengan pemilik lahan untuk menerima pembayaran atas kinerja ERR atau memiliki hak penuh atas kredit yang akan memungkinkan pengalihan hak.

10. Apakah TREES memerlukan Persetujuan Setelah Penjelasan dan Sebelumnya Gratis (FPIC)?

TREES Safeguard Theme 2.3 secara eksplisit mensyaratkan FPIC ketika relokasi diusulkan sebagai bagian dari kegiatan REDD+. Ada keadaan. keadaan tambahan yang juga memerlukan FPIC dan keputusan. keputusan lain di mana konsultasi lebih tepat. Kami berharap hal ini diuraikan secara transparan sebagai bagian dari proses desain partisipatif yang dikembangkan oleh Peserta yang akan tersedia untuk komentar publik dan bagian dari proses validasi dan verifikasi. Dokumen panduan TREES Safeguards mencakup sumber daya tambahan bagi Peserta untuk membantu dalam membuat keputusan ini (misalnya, Panduan Program UN.REDD tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) yang mencakup panduan tentang kapan FPIC tepat, bagaimana melakukan FPIC dan bagaimana mendokumentasikan proses).